

Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru

Laila Mauludiyah^{1*}, Ainiyyah Yafiatuzabrina², Heny Kusmawati³

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Indonesia*

ABSTRAK: Education is the main pillar of the founding of a nation, education is an effort to design the future of humans as a generation that advances a nation, over time the concept of education inseparable from government policy, changes occur from time to time and even increase in terms of quality but in its improvement there are also several things that need attention direct. The new order started from 1968 to 1998 when the government was led by TNI H. M. Suharto as a centralized president. Education policy during the New Order era centralization or also known as centralization. Implementation of education in the new year In the Order era, its function was transferred as a national economic instrument Development in education was carried out under bureaucratic rule administrative power. Uniformity of teaching methods and evaluation systems. Focus from This study is about the education system during the New Order era, educational excellence during the order and the lack of education during the new order. This research uses qualitative with historical research methods. In the new order era, the system progressed, especially in primary schools, the quality of teaching staff is very poor, however the number of teachers is increasing and continuously being graduated so that the quality is maintained not as expected.

Riwayat Artikel

Received: 21-07-2023

Accepted: 23-07-2023

Kata Kunci

Education System, New Order

Pendahuluan

Setelah PKI ditumpas, pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto terus melakukan reformasi dan pembangunan di segala bidang termasuk pendidikan. Ketetapan MPRS Nomor: XXVII/Tap/MPRS/1966 yang isinya Tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia pancasila sejati ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan UUD 1945, Jadi pikirkan tentang upaya reformasi pendidikan. Sejak 1959, Indonesia terletak di dasar manifesto politik USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Karakter Indonesia). Manipol-USdek sebagai "dewa" dalam kehidupan politik maupun dalam segala bidang hidup termasuk dalam bidang pendidikan. Keputusan Presiden No. 145 tahun Tahun 1965, tujuan pendidikan nasional pada era Orde Lama dicocokkan dengan manipol-USDEK. Objektif pendidikan yang diterapkan adalah Panca Wardana (5 titik pengembangan). Objektif Pendidikan ini tidak berlangsung lama dan ditinggalkan setelah merebaknya peristiwa tersebut Gram 30/S/PKI tahun 1965 (Abdullah, 2011).

CONTACT: Laila Mauludiyah  dyahmaza@gmail.com

© 2023 The Author(s). Published by Literasi Nusantara Publisher.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

Rakyat mulai menyadari bahwa niat politik PKI tertahan tujuan pendidikan dengan menggunakan Pancasila sebagai tameng. Keluarnya Ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966 menghapus Ketetapan tersebut Presiden No. 145 Tahun 1965 dan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem pendidikan nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada akhir tahun 1965 Penumpasan PKI berhasil dilakukan oleh ABRI dan rakyat, tetapi politik PKI tidak hilang karena tidak dibubarkan oleh pemerintah (Presiden). Ketidakpuasan dari masyarakat atas ketidaktegasan Presiden Sukarno terhadap demonstrasi terus menuntut tritura yang isinya merupakan politik larangan terhadap PKI di Indonesia yang berdampak dikeluarkannya Supersemar 11 Maret 1966. Pada tahun 1966 terjadi dualisme kepemimpinan antara Soeharto dan Sukarno. Penerbitan TAP MPR Nomor: XIII/MPRS/1966 tanggal 25 Juli 1966 yang membawa Soeharto membentuk kabinet Presiden baru, di sisi lain, memegang kekuasaan pemerintahan serta kepala negara. Sukarno sebagai kepala negara dan Soeharto sebagai kepala negara yang menjalankan kerusuhan, MPRS diadakan sidang khusus bertepatan pada tanggal 7-12 Maret 1967 yang menghasilkan Ketetapan Nomor: XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara juga pemerintahan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden (Syaharuddin dan Susanto, 2019; Zuhdi, dkk., 2018)

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitar. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting untuk masa depan (Nizar, 2009). Kita telah mengenal pendidikan itu sejak dulu zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Pendidikan menjadi satu hal utama yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi semua orang jika mereka benar-benar melakukannya. Pendidikan adalah sebuah proses belajar tentang moral, pengetahuan dan keterampilan yang menjadi kebiasaan sekelompok orang secara turun-temurun untuk melakukan pengajaran, observasi, pelatihan atau penelitian (Suharto, 2005). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1), pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (<https://institut.ritdtekdkti.go.id>).

Secara langsung atau tidak langsung pendidikan mampu memberi kita pengetahuan baru, membentuk karakter pribadi yang lebih baik dan memudahkan kita memulai karir masa depan. Pendidikan menurut salah seorang tokoh yaitu M.J. Langeveld (1980), adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang orang dewasa untuk mencapai kedewasaan seseorang, terutama anak-anak yang masih belum dewasa (<https://www.academia.edu>). Sejarah pendidikan mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan terendah dibandingkan dengan negara-negara lain, meskipun ada upaya pemerataan sistem pendidikan dilakukan dan dianggap peningkatan yang signifikan (CNN Indonesia). Pendidikan saat ini Secara umum, mungkin sudah dilakukan di hampir seluruh

wilayah Indonesia. Sistem Hampir semua pendidikan dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti komputer/laptop, LCD proyektor, handphone, WIFI, dan sebagainya.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan demikian periode pembangunan nasional. Khususnya dalam bidang pembangunan pendidikan pendidikan dasar, terjadi lompatan yang sangat signifikan dengan keberadaannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah penerapan Inpres ini hanya berlangsung secara kuantitas tanpa diimbangi dengan pertumbuhan yang berkualitas. Hal terpenting saat ini adalah menghasilkan lulusan yang berpendidikan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil pendidikan. Pada saat itu Pada masa Orde Baru, kurikulum selalu mengalami perubahan hampir setiap dekade kurikulum 1968, 1975, 1984 dan terakhir kurikulum 1994. Tentu saja dari perubahan itu Dalam kurikulum juga terjadi perubahan tujuan pembelajaran dan sistem pendidikan, Orde Baru tidak seperti Orde Lama, pendidikan Orde universal Lama sebagai bentuk interpretasi pasca kemerdekaan atas dasar penguasaan kekuasaan Soekarno cukup untuk menyediakan ruang kosong untuk pendidikan.

Pemerintahan yang berdasarkan sosialisme merupakan acuan dasar bagi pendidikan dibangun dan dilaksanakan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang Sebaliknya pendidikan pada masa Orde Baru dipandu oleh pemerintahannya menurut Suharto, Orde Baru identik dengan pandangan hidup atau semboyan pembangunan. Demikian pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerak pembangunan. Kata pembangunan didahulukan sebelum Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Meskipun pembangunan tidak secara formal digunakan sebagai cara hidup, namun menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam memusatkan jalannya pemerintahan dan pendidikan tidak hanya Pancasila. Kurikulum 1984 mengusung "pendekatan keterampilan proses" yang berarti proses menjadi lebih bermakna dalam penerapan pendidikan, tetapi tujuan selalu merupakan aspek yang bermakna. posisi siswa dalam kurikulum ini sangat mengamati, mengklasifikasikan, mendiskusikan, sampai memberi tahu. Model ini disebut Metode Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL), (<https://attriolong.com>).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode sejarah (Sjamsudin, 2012). Metode sejarah dapat dikatakan suatu proses mengkaji, menganalisa dan membaca secara kritis redaksional buku teks dan mengaitkan dengan kondisi masyarakat pada tahun berlangsungnya kurikulum 1975. Penggunaan metode historis dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui 4 tahap penelitian, yaitu: (1) Heuristik, menghimpun bahan-bahan atau sumber melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi (4) Historiografi. Topik dalam pembuatan artikel ini sudah ditentukan oleh ibu/bapak dosen mata kuliah "sejarah pendidikan" sedangkan sistematika berikutnya mulai dari pembuatan judul, abstrak, inti, pendahuluan hingga pembahasan menggunakan literatur baca mulai dari e-book, jurnal, artikel, makalah, laporan penelitian terdahulu, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

Dalam pembuatan artikel juga terdapat sistem mengumpulkan informasi yang terpercaya (relevan) dengan topik yang sudah ditentukan dari pembahasan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Pendidikan Indonesia Antara Tahun 1965 Hingga Runtuhnya Orde Baru

Orde baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun (tahun 1965-1998), pada awal orde baru secara umum tujuan pendidikan adalah untuk membantu manusia yang berjiwa pancasila, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur serta berkepribadian indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Politik pendidikan yang diambil oleh pemerintah orde baru, memiliki karakteristik diantaranya adalah sentralistik, depolitisasi masyarakat, penguatan kekuasaan pemerintah, dan terkesan kurang serius. Walaupun, dalam undang-undang dan lembaga pendidikan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, itu tidak secara tegas dinyatakan karakteristik sentralistik tersebut, namun pada pasal demi pasal dapat dilihat tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan.

Selain itu, pemerintah orde baru juga berupaya menggiring politik pendidikannya pada upaya depolitisasi masyarakat. Dalam struktur organisasi mahasiswa tidak diperkenankan adanya unit kegiatan mahasiswa yang menjadi wadah aktivitas politik secara praktis dalam Perguruan Tinggi. Maka siswa tidak diperkenankan berpolitik praktis dikampusnya. Normalisasi Kegiatan Kampus (NKK) dan Badan Kegiatan Kemahasiswaan (BKK) adalah senjata yang sangat ampuh untuk meredam meningkatkan pemberdayaan politik mahasiswa.

Pemerintah orde baru juga mengarahkan politik pendidikannya pada penguatan kekuasaan pemerintah atau negara. Dalam hal ini, semua pegawai negeri yang berkecimpung di bidang pendidikan tidak diperkenankan untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Kebijakan ini menyebabkan para penyelenggara pendidikan hanya memiliki satu orientasi saja, yaitu loyalitas terhadap pemerintah. Ciri khas yang terlihat adalah lebih suka memaksakan gagasan dari pusat ke daerah yakni lebih cenderung bersifat sentralistik, termasuk sistem pendidikannya pada masa orde baru bersifat sentralistik dimana siswa, guru, bahkan pendidikan itu sendiri menjadi alat penguasa untuk mempertahankan status quo, begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan.

Di dalam mengaktualisasi pembangunannya, Orde baru setiap lima tahun memiliki program pembangunan, yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Dalam Pelita I merumuskan kedudukan pendidikan tinggi di dalam pembangunan nasional. Perkembangan berlanjut ketika MPR hasil Pemilu 1973 mengeluarkan ketetapan Nomor IV/MPR/1973 yang juga dikenal sebagai nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang juga merumuskan tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut "Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan nasional yang dijadikan GBHN tersebut, bertujuan bahwa pendidikan nasional tidak lagi membentuk manusia-manusia Indonesia yang berpancasila sejati, tetapi disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila. Kata pembangunan

didahulukan sebelum Pancasila. Ini menandakan bahwasanya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tapi menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah orde baru berdasarkan Proyek Penelitian Nasional Pendidikan (PPNP) dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektifitas dan efesiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Keempat permasalahan ini oleh pemerintah orde baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut adalah pertama, melanjutkan program pemberantasan buta huruf yang pada tahun 1972 dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan keterampilan tertentu; kedua, melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta ketrampilan ; ketiga, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebagai kebutuhan praktis; keempat, mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan , misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar, dan sebagainya; kelima, pembinaan generasi muda melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa Kampus, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), atau organisasi kepemudaan lainnya; keenam, dilaksanakannya program orang tua asuh mulai tahun 1984.

Kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru semakin jelas ketika dikeluarkannya undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seluruh sistem pendidikan yang ada di Indonesia harus mengacu pada undang-undang tersebut, bagaimanapun bentuk dan kondisinya. Upaya-upaya diatas merupakan kebijakan pendidikan pemerintah orde baru yang direncanakan secara nasional. Namun demikian, dalam realisasinya kebijakan pendidikan mengarahkan pada satu tujuan untuk memperkuat hegenomi pemerintah orde baru di hadapan masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa kebijakan politik suatu negara akan sangat mempengaruhi politik pendidikannya. Sikap baik pemerintah orde baru terhadap rakyat tidak dapat membendung jatuhnya pemerintah orde baru yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan politis yang dianggapnya sudah melenceng. Sistem politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Akibatnya saluran demokrasi menjadi tersumbat, aspirasi rakyat terkooptasi, rakyat menjadi apatis, mandul dan cenderung mengikuti budaya petunjuk dari atas. Keadaan ini memberikan peluang yang leluasa bagi sebagian pejabat yang kurang amanah untuk melakukan penyimpangan dalam segala bidang. (Mudyaharjo, 2013).

Mulcullah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli hukum, jual beli jabatan, ijazah dan sebagainya. Keadaan internal yang parah ini pada gilirannya tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang membawa dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Dalam keadaan demikian itulah timbul gelombang demonstrasi besar-besaran yang berakhir dengan tumbanganya pemerintah orde baru pada 21 Mei 1998 digantikan oleh pemerintah orde reformasi. Karakteristik pendidikan Indonesia dari tahun 1960,1975 hingga runtuhnya orde baru masih terkungkung pada belajar yang dianggap usaha siswa dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi bisa belum menuju belajar merupakan usaha dari tidak menciptakan

menjadi menciptakan. Sema ketika penelitian masih dianggap menemukan sesuatu saja bukan menciptakan sesuatu. Sehingga pendidikan Indonesia masih stagnan dalam ketertinggalan dengan bangsa lain. Kemiskinan daya cipta yang cukup tinggi dalam pendidikan Indonesia mengakibatkan seperti pelajaran sejarah SMA masih berkuat berupa hafalan dan kemampuan kognitif semata dan belum mencapai tahap daya cipta berfikir kritis. Sehingga tidak mengherankan ketika buku teks pelajaran sejarah dalam dari tahun 1975 sampe 2006 (31 tahun) tidak ada pembaharuan yang signifikan. Komposisi materi cenderung sama hanya kemudian sudut pandang yang berbeda dan beberapa perbaikan di beberapa materi sejarah terutama yang berkaitan tentang porpolitikan di Indonesia.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sejak Tahun 1965 dan Pelaksanaannya

Ketetapan MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 bab II pasal 3, dicantumkan bahwa tujuan pendidikan nasion Indonesia dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan Syaharuddin & Heri Susanto (2019) seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indokyrinasi Manipol USDEK pada zaman Orde Lama, pemurnian semangat Pancasila di pada zaman Orde Lama, pemurnian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan tegaknya Orde Baru.¹⁸⁰ Secara umum tujuan pendidikan telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII pasal 31:

- a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Hal tersebut kemudian dikuatkan dalam pasal 4 ketetapan MPRS No XXIIMPRS/1966 tersebut, selanjutnya disebutkan tentang isi pendidikan harus memuat:

- a. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama.
- b. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- c. Membina/mengebankkan fisik yang kuat dan sehat.

Ketetapan MPRS di atas menjadi penanda berubahnya pendidikan nasional dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Itu sangat kentara. Setidaknya, terdapat dua hal, yaitu pembentukan manusia secara pancasilais sejati yang dikaitkan oleh peristiwa tragis pasca Gerakan 30 September atau 1 Oktober, ketika Orde Baru menuduh PKI sebagai pengkhianat Pancasila karena ingin mengubah Dasar Negara Pancasila menjadi komunis. Kemudian yang kedua adalah mengubah mental masyarakat yang penuh doktrin-doktrin Manipol USDEK, yang merupakan kebijakan Soekarno. Jadi, Orde Baru mencoba mengidentifikasi dirinya dengan jalan memutus pengaruh PKI dan Soekarno, termasuk dalam hal ini bidang pendidikan.

Selanjutnya, TAP MPRS tersebut menyatakan agar di perguruan-perguruan tinggi diberikan kebebasan mimbar/ilmiah seluas-luasnya yang tidak menyimpang dari UUD 1945 dan falsafah negara, Pancasila. Selanjutnya, pemerintah lebih memerhatikan perkembangan gerakan Pramuka dan memberikan prioritas yang diperlukan dengan meninjau kembali Keputusan Presiden tentang Pembentukan Organisasi Gerakan Pramuka agar disesuaikan dengan tingkat perkembangan sekarang ini.

Lembaga pemerintahan dalam bidang pendidikan disederhanakan, baik mengenai jumlah maupun strukturnya. TAP MPRS tersebut juga melihat keadaan dunia pendidikan pada saat itu dan mengingat kemajuan perkembangan belajar pada masa-masa yang akan datang dengan adanya kekurangan tenaga pengajar, antara lain melalui Undang-Undang Wajib Belajar. Menurut pemerintahan Orde Baru, perlu menyelenggarakan pendidikan rehabilitasi kesadaran berideologi bagi mereka yang pernah menyeleweng terhadap Pancasila.

Pada 28-30 April 1969, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar/pemikir pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional yang tengah terjadi saat itu. Di dalam pertemuan tersebut, para pakar mengambil kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor luar, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, serta faktor-faktor intern. Kedua faktor tersebut harus diidentifikasi secara cermat, baru kemudian disusun suatu strategi serta program penanggulangannya.

Pada saat itu, disadari bahwa pemerintah belum mempunyai strategi umum yang menyeluruh dan jelas yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Badan-badan pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tidak mempunyai otoritas yang jelas. Artinya, tanggung jawab dan fungsi badan-badan tersebut simpang siur sehingga arahnya kurang jelas efisiensinya tentunya rendah.
- b. Para penyelenggara pendidikan belumlah profesional. Artinya, tingkat kemampuan para penyelenggara pendidikan belum sanggup melaksanakan proses pendidikan secara profesional. Bukan hanya karena jumlahnya yang masih kurang, melainkan pada masa sebelumnya banyak dicampuri oleh unsur-unsur politik.
- c. Pelaksanaan pendidikan terlalu dibawah pengaruh politik sehingga proses pendidikan yang sebenarnya kedua, sedangkan praktik politik praktis menjadi sangat dominan dalam lingkungan kehidupan pendidikan nasional.
- d. Badan-badan penyelenggara pendidikan yang tidak profesional tersebut lebih diperparah lagi karena tidak diperkuat oleh tim-tim peneliti. Hal ini disebabkan pada masa itu politik adalah panglima dan profesionalisme merupakan hal nomor dua. Demikian pula jumlah pakar-pakar pendidikan pada waktu itu masih sangat terbatas.

Diadakannya Konferensi Cipayung tersebut memiliki tiga tujuan. Pertama, mengidentifikasi semua persoalan di bidang pendidikan. Kedua, menyusun suatu prioritas dari berbagai persoalan tersebut untuk dipecahkan atau diperhatikan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Ketiga, mencari alternatif pemecahan.

Hasil identifikasi masalah-masalah pendidikan dari Konferensi Cipayung menggolongkan masalah tersebut dalam kategori sebagai berikut:

- a. Pendidikan luar sekolah.
- b. Kurikulum sekolah dasar.
- c. Kurikulum sekolah menengah.
- d. Kurikulum pendidikan tinggi.
- e. Pembiayaan pendidikan.
- f. Sarana pendidikan.

Salah satu hasil Konferensi Cipayung yang terkenal itu ialah lahirnya Proyek Penelitian Nasional Pendidikan pada 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud Tanggal 26 Mei 1969 Nomor 003/1969. Isi SK tersebut ialah dalam jangka waktu dua tahun (kemudian diubah menjadi tiga tahun) PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Melalui Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) diharapkan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan (BPP) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang didirikan melalui Keputusan Presiden No. 84/1969 tanggal 18 Oktober 1969. Menurut catatan, badan pengembangan ini merupakan institusi pertama didirikan dalam lingkungan pemerintah yang kemudian diikuti oleh badan-badan sejenis di departemen-partemen lain.

Tugas dari Badan Pengembangan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan.
- b. Mengadakan eksperimen-eksperimen dan proyek-proyek perintis dalam rangka pengembangan pendidikan.
- c. Menyiapkan rencana, program, dan kebijaksanaan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Di dalam mengatualisasi pembangunannya, Orde Baru setiap lima tahun memiliki program pembangunan, yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

Persoalan mendasar dari Pelita I adalah bangsa kita dalam kondisi kekurangan tenaga-tenaga terampil. Tenaga kerja dari lulusan pendidikan kita saat itu menunjukkan bahwa lebih dari setengah angkatan kerjanya mempunyai latar belakang pendidikan di bawah tamatan SD. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memberikan prioritas tinggi dalam mengembangkan pendidikan kejuruan sejak Pelita I. sekolah-sekolah kejuruan dibenahi dan ditingkatkan mutunya dengan pengadaan guru serta instruktur yang berwenang, pengadaan alat-alat bantu belajar dan mengajar, fasilitas-fasilitas praktik yang sesuai sehingga diperoleh lulusan sekolah-sekolah kejuruan yang bermutu.

Pada tahun akhir Pelita I telah dibangun sejumlah sekolah dasar baru sehingga dapat menampung siswa baru sejumlah 720.000 orang. Walaupun begitu, sebenarnya di dalam Pelita I memang belum secara eksplisit akan dikembangkan perluasan pendidikan dasar. Pelita I merupakan suatu era rehabilitasi dari sistem pendidikan yang ada.

Dalam Pelita I merumuskan kedudukan pendidikan tinggi di dalam pembangunan nasional. Kita bisa melihat rumusan tersebut kurang memberikan ruang kebebasan dunia akademik berkaitan dengan keilmuan dan mendorong kreativitas sehingga memunculkan ilmuwan dan tokoh bangsa. Rumusannya yaitu:

- a. Sebagai pusat pemeliharaan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa mendatang.
- b. Mendidik mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.
- c. Mengingat mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

- d. Mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadai dan tampak jelas corak kepribadian Indonesia.

Pada Pelita I, pemerintah mendirikan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan suatu lembaga baru, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan (BPP). Tugas BPP ialah mengadakan penelitian dan pengembangan untuk menunjang program-program pendidikan. Demikianlah rencana bidang pendidikan di dalam Pelita I mulai disempurnakan berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan oleh BPP. Selanjutnya, mulai terasa bahwa untuk memperoleh rencana yang baik diperlukan data yang cukup memadai dari lapangan.

Perkembangan berlanjut ketika MPR hasil Pemilu 1973 mengeluarkan ketetapan nomor IV/MPR/1973 yang juga dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang juga merumuskan tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut, "Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pembangunan dibidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara, Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan Pendidikan Guru di Indonesia Antara Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru

Sepanjang periode Orde Baru, dunia pendidikan nasional mengenal empat kurikulum, yakni kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tiga kurikulum 1975, 1984, 1994 sangat output dari kalangan peserta didik. Mereka diharapkan menjadi tenaga yang terampil, berbudi luhur, serta berpedoman kepada agama dan nilai-nilai pancasila. Kurikulum pada era orde baru dijadikan sebagai kerangka pendidikan.

Sementara itu pendidikan guru sebelum era 1970-an pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem terintegrasi yaitu pola penyiapan guru yang memadukan elemen pendidikan yang bercirikan nasionalisme, pedagogik, ilmu jiwa, bidang studi yang diajarkan, dan praktik mengajar sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembinaan akademik dan profesi. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menghasilkan calon guru dengan kualifikasi lulusan sarjana muda (*bachelor degree*) dan lulusan sarjana (*doctorandus* dan *doctoranda*).

Kurikulum 1975, Pendidikan guru dilaksanakan dengan sistem concurrent atau terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang ditandai dengan pemberian Ijazah dan Akta Mengajar bagi setiap lulusannya. Kurikulum ini terdiri dari pengembangan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi yang diperkuat dengan

pengembangan jati diri bangsa Indonesia melalui Mata Kuliah Dasar Umum yang dimaksudkan untuk menyiapkan pendidik yang *religious*, nasionalis, patriotik, dan kepribadian luhur. Pengelompokan kurikulum waktu itu adalah Kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Penguasaan Bidang Studi (MKPBM). MKDK dan MKPBM adalah mata kuliah untuk menyiapkan calon pendidik menguasai kompetensi akademik bidang studi yang dilandasi dengan MKDU.

Untuk kurikulum 1984, pendidikan guru masih sama dengan kurikulum 1975 yaitu dilaksanakan dengan sistem *concurrent* atau terintegrasi, yaitu terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang ditandai dengan pemberian ijazah dan akta mengajar bagi setiap lulusannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pendidikan kepada siswa yang belajar sebagai hasil akhir dari sebuah proses pendidikan. Kaitannya dengan ijazah dan akta mengajar ini menjadi sebuah landasan dalam penentuan kategori mengajar mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan.

Untuk kurikulum 1994, pendidikan guru pendekatannya adalah topik inti (*content based curriculum*), yang menekankan hasil belajar pada keutuhan penguasaan substansi ilmu, dan dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Keahlian I (MKK I) dan Mata Kuliah Keahlian II (MKK II). MKK I adalah kelompok mata kuliah untuk pengembangan kompetensi akademik kependidikan, dan MKK II adalah kelompok mata kuliah untuk pengembangan kompetensi akademik bidang studi. Pendidikan guru adalah cara pemerintah merintis standar nasional pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional maka akan terbentuk generasi yang memahami kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan.

Pada *implementasi* (pelaksanaan) kurikulum tersebut, LPTK pernah menerapkan kebijakan untuk menyiapkan lulusannya tidak hanya menguasai kemampuan utama sesuai program studinya, tetapi juga kewenangan tambahan yang dikenal dengan program *Post Secondary Subject Matter* (PSSM) dengan beban belajar kurang lebih 20 sks, sebagai contoh mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa dapat mengambil PSSM Pendidikan Bahasa. Namun program tersebut kurang sempurna dalam pelaksanaannya, terutama dalam koordinasi pelaksanaan pembelajaran lintas program studi, dan lintas fakultas.

Pendidikan Guru (SPG) untuk mengatasi kekurangan guru. SPG sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1964, tetapi pelaksanaannya di setiap daerah baru terlaksana mulai tahun 1967. Pada tahun 1960-an, terdapat 82 SPG di Indonesia. Jumlah ini menurun pada tahun 1961-1965 yang kemudian meningkat kembali menjadi 123 SPG. Pada saat dilaksanakan kebijakan SPG, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SPG tahun 1968 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum SPG tahun 1976. Penggantian kurikulum ini berdasarkan Keputusan Menteri P dan K tanggal 21 Juli 1976 No.0185/U/1976 tentang Pembakuan Kurikulum SPG. Menjelang tahun 1980, SPG negeri mulai dikurangi karena jumlah guru yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah mulai tercukupi. SPG secara bertahap kemudian dialihfungsikan menjadi sekolah menengah atas lainnya.

Alih fungsi tersebut dimulai pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1990. Pada saat itu, SPG dialihfungsikan menjadi SMA, SMK, STM, SKK, maupun sekolah menengah atas lainnya.

IKIP maupun FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970-an di samping juga menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989, SPG dilebur ke dalam IKIP/FKIP. Dalam perkembangannya lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Pada tahun 1999 dan 2000, sepuluh IKIP berubah nama menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Jumlah tersebut terus bertambah, terutama dengan berkembangnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) swasta. (LITBANG KOMPAS)

Dampak Perkembangan Globalisasi Terhadap Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Sejarah

Semakin tambah pesatnya perkembangan kemajuan zaman terutama dalam bidang pengetahuan ilmu teknologi, tentu akan memberikan pengaruh dan membawa dampak terhadap pendidikan. Realitanya, pendidikan mengalami krisis nilai. Pendidikan hanya menghasilkan lulusan berbasis pengetahuan (*kognitif*), banyak menguasai teori dan teknologi, tetapi kurang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana anak bisa mencapai nilai yang tinggi, artinya keberhasilan seorang anak hanya diukur dengan angka atau nilai raport, menguasai teknologi, cepat mencapai gelar Sarjana, Master, Doctor, atau Profesor, setelah lulus dari instansi pendidikan akan kerja dimana, dan sebagainya. Nilai-nilai humanistik, jujur, disiplin, tanggung jawab terabaikan dan kurang mendapat perhatian utama baik dari lembaga pendidikan maupun masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat potret atau gambaran pendidikan di era industri dan globalisasi ini, keberhasilan manusia diatur dan diukur oleh mesin, teknologi, dan mengabaikan kecerdasan *humanis* yang sebenarnya harus di prioritaskan diatas pengetahuan lainnya. Dampak dari hal ini akan melahirkan individu-individu yang memiliki orientasi hidup *hedonis*, *materialistis* dan memiliki kepribadian yang terbelah (*split personality*). Pendidikan merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggungjawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Pendidikan harus mengkaitkan proses pendidikan berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat kita harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan masyarakat dunia. Dalam demisi ekonomi. Akibat krisis yang dirasakan langsung dalam pendidikan adalah:

- a. Menurutny kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pendidikan.
- b. Meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya motivasi belajar siswa.
- c. Menurunnya status kesehatan dan mutu gizi anak.
- d. Meningkatkan angka pengangguran, termasuk pengangguran terdidik.

Kemudian yang berimplikasi dalam. Namun demikian meskipun globalisasi mempengaruhi dalam paradigma pendidikan, tetapi setidaknya proses globalisasi itu sendiri

memberikan kendala dan peluang bagi pendidikan, yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia;

- a. Mutu pendidikan yang masih rendah dan tingginya angka putus sekolah.
- b. Belum dimanfaatkan secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan, karena rendahnya penguasaan teknologi para pelaku pendidikan.
- c. Belum berkembangnya budaya belajar dikalangan masyarakat.
- d. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih belum sesuai.
- e. Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi.
- f. Terjadi gejala umum menurunnya moral, budi pekerti, rasa toleransi dikalangan peserta didik dan generasi muda.

Pendidikan yang tengah berlangsung harus mampu mempersiapkan sis minimal lima kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi ini, yaitu: (1) kompetensi intelektual yakni kemampuan berpikir dan bernalar, kreatif inovatif, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan strategis. (2) kompetensi personal, yakni memiliki keluhuran jiwa dan moral yang baik, berupa kejujuran, disiplin, kemandirian, kritis dan tanggung jawab, (3) kompetensi komunikatif, yakni memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi dengan orang lain, (4) kompetensi sosial budaya, yakni kemampuan hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain, dan (5) kompetensi kinestesis vokasional, yakni kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan kehidupan global.

Simpulan

Pendidikan menjadi hal yang paling penting untuk memajukan sebuah bangsa baik dari segi pembangunannya maupun secara pemerintahannya. Orde baru sering disebut sebagai orde pembangunan atau masa pembangunan dikarenakan pada saat itu pembangunan yang merata di daerah-daerah Indonesia baik itu dipelosok wilayah Indonesia tidak hanya itu pertumbuhan ekonomi juga pada saat itu cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, penekanannya hanya dalam segi intelektual lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (management by objective) selanjutnya kurikulum 1984 berisi process skill approach model CBSA (cara belajar siswa aktif) atau SAL (student active learning), kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Jenis pendidikan pada masa Orde Baru terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari jenjang pra sekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari Orde Lama pada pelaksanaannya kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional,

kebijakan pendidikan semuanya terpusat, pendidikan di selenggarakan dengan otorita kekuasaan administratif birokratis dan penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pendidikan umum hendaknya tidak ditekankan hanya untuk kepentingan negara saja melainkan lebih memikirkan masa depan siswanya juga, pada Orde Baru ini pendidikan difokuskan untuk penguasa-penguasa saja seharusnya itu semua dihilangkan dan diminimalisirkan.

Referensi

- Abdullah, T. (2011). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: Ichtiar Baru Van Haove.
<https://attriolong.com>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.
<https://www.academia.edu>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.
- Mudyahardjo, Reja. 2013. Pengantar Pendidikan. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Rifa'i. 2011. Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nizar, R. D. (2009). Filsafat Pendidikan: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya. Jakarta: Kalam Mulia.
- Soemanto Wasty dan F.X. Sofyarno, 193. Landasan Historis Pendidikan Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama.
- Susanto, Zuhdi, dkk. 2018. Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Buku Sekolah Elektronik.
- Syahrudin dan Susanto, Heri. 2019. Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi). Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.